

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Keuangan. 2018. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 2018. tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga*. Jakarta, Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan. 2016. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan*. BN.2017/NO.30, jdih.kemenkeu.go.id : 44 hlm.
- Kementerian Keuangan. 2017. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian 71 Negara/Lembaga*. BN.2017/NO.1963, jdih.kemenkeu.go.id : 31 hlm.
- Kementrian Keuangan. 2020. *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 4/PER-4/PB/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga*.
- Kementrian Keuangan. 2021. *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 4/PER-4/PB/2021 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 80. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan*.
- Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran. 2014. *Pokok-Pokok Siklus APBN Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran. 2014. *Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Keuangan.

- Pemerintah Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*. Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 2149.
- Materi Anggaran tentang Kebijakan dan Implementasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 serta Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal.<http://kppnmetro.org/2020/02/kebijakan-dan-implementasi-ikpatahun-2020-s-129/>
- Rasidi, Didi. (2011). *Monitoring dan Evaluasi*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.<http://perencanaan.ipdn.ac.id/kajianperencanaan/kajianperencanaan/monitorin>
- Ramdhani, D., & Anisa, I. Z. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(1), 134–148.
<https://doi.org/10.35448/jrat.v10i1.4223>
- Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran. (2014). *Pokok-Pokok Siklus APBN Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga*. Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1025.
- Direktorat Pelaksanaan Anggaran. (2021). *IKPA Capaian Output Sesuai PER4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja K/L*.
http://rokeu.kemkes.go.id/rokeubmn2/images/BEKASI_APR_21_PERBEND/1_Sosialisasi_IKPA_Capaian_Output_Kemenkes_Apr_2021.pdf
- Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran. (2014). *Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran. (2014). *Pokok-Pokok Siklus APBN Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Humas. (2015). *Pengertian Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah*.
<https://setkab.go.id/pengertian-monitoring-dan-evaluasi-kebijakanpemerintah/>